

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD.

Rencana Kerja (RENJA) Kantor Kesbangpol mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Rencana Kerja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan RENJA SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan RENJA SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kota Solok.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, RKPD yang dilanjutkan dengan RENJA SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan RENJA SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, Prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA), sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. UU Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapam, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. UU Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Solok.
10. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok Tahun 2010-2015;
12. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok Tahun 2016-2021;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Solok ini adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun rencana pembangunan masing-masing SKPD dan juga merupakan pemutakhiran rencana kerja dari Renstra masing-masing SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan, yang nantinya menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD (RKA – SKPD).

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah mendiskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Solok sehingga program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program-program prioritas.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok Tahun Anggaran 2016 ini disusun dalam beberapa BAB dengan Sistimatika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Yang merupakan Bab Pengantar yang berisikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistimatika Penulisan.

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA-SKPD TAHUN LALU

Bab ini menguraikan Evaluasi Pelaksanaan Renja-SKPD tahun lalu, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isis-isu penting dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi , serta Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini menjelaskan tentang Tujuan dan Sasaran, serta Program dan Kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok Tahun 2018.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang Kaidah Pelaksanaan dari Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR KESBANGPOL TAHUN 2016

Pada Tahun 2016 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik telah berdiri sendiri berdasarkan Perda Nomor 09 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kota Solok. Melaksanakan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Dengan 9 Program dan 27 Kegiatan.

Pada tahun 2016 ini merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok tahun 2016-2021. Dalam melaksanakan program dan kegiatan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan. Pada tahun 2016 Belanja Langsung Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal. Selama Tahun 2016 secara umum dalam pelaksanaan kegiatan alhamdulillah tidak terdapat hambatan dan kendala yang berarti.

Secara fisik realisasi kinerja mencapai 91,81% dan realisasi keuangan mencapai 81.51%. Hal ini adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016 dan Evaluasi capaian Renstra telah dilaksanakan. Secara umum semua program dan kegiatan telah terlaksana sesuai dengan rencana.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KANTOR KESBANGPOL

Kinerja Pelayanan SKPD salah satunya dapat diukur melalui indikator kinerja yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) atau indikator kinerja utama yang ditetapkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok tidak memiliki Standar Pelayanan

Minimal (SPM), oleh karena itu kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok diukur melalui Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Solok yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Solok Nomor 188.45/413/KPTS/WSL-2011, serta melalui pencapaian sasaran strategis yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok Kota Solok Tahun 2016-2021.

Secara umum sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok tahun 2016 dapat dilaksanakan dengan baik. Rincian pencapaian dan analisis kinerja masing-masing sasaran pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Sasaran 1

Meningkatnya Ketahanan Bangsa dibidang Idiologi, Politik, Sosial, Budaya, dan Ekonomi.

Untuk mencapai sasaran ini pada tahun 2016 telah dilaksanakan 3 (tiga) kegiatan:

- a. Peningkatan Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Aparat Sektoral dan Tokoh Masyarakat dalam Pemeliharaan Kamtibmas pada tahun anggaran 2016 dialokasikan anggaran sebesar Rp.209.595.500,- telah terealisasi Rp.146.260.200,- atau 69,78%. Secara fisik kegiatan ini telah terlaksana 75%.
- b. Peningkatan Kerjasama Tim Terpadu Kota Solok dalam penanganan gangguan keamanan, pada tahun 2016 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 21.900.000.- telah terealisasi Rp. 15.845.000,- atau 72,35%. secara fisik kegiatan ini telah terlaksana 75% hal ini disebabkan karena Kota Solok berada dalam keadaan aman dan terkendali selain itu komunikasi antar SKPD sering dilakukan secara langsung dengan cara mengunjungi dan mengantarkan Laporan yang diminta ke SKPD terkait.

- c. Fasilitasi rapat koordinasi pengawasan aliran kepercayaan masyarakat (PAKEM), pada tahun 2016 dialokasikan anggaran sebesar Rp.10.215.000.- Kegiatan ini tidak terealisasi sebesar Rp. 3.466.000,- atau 33,93% secara fisik kegiatan ini telah terlaksana 50%. Hal ini disebabkan karena Kegiatan PAKEM ini pelaksananya adalah Kantor Kejaksaan Negeri Solok, Kantor Kesbangpol hanya sebagai fasilitator.

Sasaran 2

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan

Untuk mencapai sasaran ini sampai dengan akhir tahun 2016 telah dilaksanakan 6 (Enam) kegiatan, antara lain:

- a. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.15.201.000,- telah terealisasi Rp. 7.334.000,- atau 48,24%. Secara fisik terlaksana 70,66%.
- b. Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa tahun anggaran 2016 di alokasikan anggaran sebesar Rp. 22.923.500,- terealisasi sebesar Rp. 19.503.300,- atau sebesar 85,07%. Secara fisik kegiatan ini telah terlaksana 94,00%.
- c. Penyiapan Tenaga Pelaksana Upacara. Tahun anggaran 2016 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.12.745.000,- telah terealisasi sebesar Rp.8.880.200.- atau 69,67% secara fisik kegiatan ini telah terlaksana 92,42%
- d. Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba, tahun anggaran 2016 telah dialokasikan dana sebesar Rp. 61.742.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 58.004.000,- atau 93,94% secara fisik kegiatan ini terlaksana 100%

- e. Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran/Penggunaan Narkoba dan Minuman Keras, tahun anggaran 2016 dialokasikan dana sebesar Rp. 251.510.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 193.047.400,- atau 76,75% secara fisik kegiatan ini terlaksana 100%

Sasaran 3

Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat .

Untuk mencapai sasaran ini sampai dengan akhir tahun 2016 telah dilaksanakan 4 (empat) kegiatan antara lain:

- a. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. Tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.9.714.000,- telah terealisasi sebesar Rp.3.844.000,- atau 39,57% secara fisik kegiatan ini tercapai 60%. Hal ini disebabkan karena hanya 4 partai Politik yang mendapat dana bantuan keuangan tahun 2015 sedangkan 6 Partai Politik tidak dapat dcaikan dana bantuan keuangannya.
- b. Penyuluhan kepada masyarakat. Tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.67.404.500,- telah terealisasi sebesar Rp. 65.219.000,- atau 96,75 % secara fisik kegiatan ini telah tercapai 98%.
- c. Bimbingan Teknis Tata Cara Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik, tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 21.098.000.- telah terealisasi sebesar Rp. 18.053.900.- atau 85,57% secara fisik kegiatan ini telah tercapai 80%.
- d. Monitoring Kelancaran Penyelenggaraan Pilkada, tahun 2015 telah dialokasikan dana sebesar Rp. 82.381.500,- telah terealisasi sebesar Rp. 46.114.000,- atau 55,97% secara fisik kegiatan ini telah tercapai 100%

Sasaran 4

Meningkatnya Hubungan Antar Lembaga yang Harmonis, efektif, dan efisien serta meningkatnya Tertib Organisasi Kemasyarakatan di Kota Solok

Untuk mencapai sasaran ini sampai dengan akhir tahun 2015 telah dilaksanakan 1 (satu) kegiatan antara lain:

- a. Pembinaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan. Tahun 2015 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.7.890.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 7.420.000,- atau 94,04% secara fisik kegiatan ini telah tercapai 100%.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai Fungsi : Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Pemberian Dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Kesatuan Bangsa dan Politik, Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK .

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, terdapat beberapa permasalahan dan hambatan, antara lain :

No	Permasalahan	Faktor-faktor Penghambat Permasalahan
1.	Semakin berkurangnya rasa dan kesadaran berbangsa dan bernegara di tengah tengah masyarakat	Adanya anggapan sebagian masyarakat, bahwa dengan telah diraihnya kemerdekaan tahun 1945, urusan Kebangsaan bagi masyarakat telah selesai, sehingga untuk mempertahankan serta mengisinya merupakan tanggungjawab Negara.
2.	Masih rendahnya Partisipasi Politik masyarakat	Partisipasi Politik masyarakat yang relatif rendah karena kesadaran politik masyarakat juga masih belum tinggi. Hal ini disebabkan kurangnya Pendidikan Politik yang dilakukan baik oleh Infrastruktur maupun Supra struktur Politik.
3.	Rendahnya pengetahuan masyarakat dalam berorganisasi.	Adanya anggapan sebagian masyarakat bahwa dengan adanya kebebasan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat yang dijamin Negara, maka cenderung tidak mematuhi koridor yang telah ditetapkan, bahkan bertingkah laku dan berbuat sewenang-wenang.

Analisis lingkungan eksternal menghasilkan tantangan dan peluang di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :

- Tantangan :
 - Adanya kegiatan kegiatan yang dapat menjurus kepada Disintegrasi bangsa yang dilakukan oleh kelompok kelompok yang tidak puas dengan kondisi saat ini
 - Tuntutan masyarakat akan kebebasan berorganisasi yang kebablasan
 - Perkembangan teknologi informasi
- Peluang :
 - Adanya Regulasi Hukum
 - Semakin tingginya taraf pendidikan masyarakat

- Adanya SOP.
- Perumusan isu-isu strategis :
 - Tersedianya peraturan dan perundang-undangan sebagai arah dan dasar dalam menentukan arah dan kebijakan yang bersifat normatif dan komprehensif. Untuk itu perlu adanya komitmen yang kuat agar peranti tersebut dapat berjalan dengan baik
 - Pemberian pelayanan diupayakan mengacu kepada Standard Operation Procedure (SOP) yang merupakan acuan kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berkaitan dengan SOP ini seharusnya dimiliki oleh seluruh SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Solok.
 - Tingkat efektifitas aparatur dalam berkoordinasi dan komunikasi antar personil cukup efektif, namun bila dilihat dari sudut profesionalisme dirasa belum optimal.
 - SDM masih perlu terus ditingkatkan dengan dukungan dan partisipasi berbagai pihak yang terkait secara terpadu dan berkesinambungan, dengan menyelenggarakan bentuk pendidikan formal maupun non formal.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur ruang gerak SKPD

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

BAB III

TUJUAN, SASARAN , PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang ditetapkan melalui UU Nomor 2 Tahun 2015 merupakan pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menyusun Renstra dan menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun dan menyesuaikan Rencana Pembangunan Daerahnya masing-masing dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional. Program yang ada dalam RPJMN ini kemudian dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dalam RPJMN Tahun 2010-2015 ini telah ditetapkan 11 prioritas pembangunan nasional dan 3 prioritas lainnya, yang akan dijadikan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahun 2017. Prioritas nasional tersebut adalah:

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Penanggulangan kemiskinan
5. Ketahanan pangan
6. Infrastruktur
7. Iklim investasi dan usaha
8. Energi
9. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana
10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik, serta
11. Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.
12. Prioritas lainnya bidang politik, social, dan keamanan
13. Prioritas lainnya bidang perekonomian
14. Prioritas lainnya bidang kesejahteraan rakyat

Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka untuk mewujudkan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional berdasarkan Tugas dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kota Solok. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Pemberian dukungan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Kesatuan Bangsa dan Politik
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah :

Tujuan :

1. Terciptanya Kehidupan yang aman ditengah masyarakat
2. Tertanamnya kesadaran rasa berbangsa dan bernegara.
3. Meningkatnya persentase Pemilih yang menggunakan hak pilihnya.
4. Terwujudnya hubungan yang harmonis antar lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang ada di Kota Solok.

Sasaran :

1. Meningkatnya ketahanan bangsa dibidang Idiologi, politik, social, dan ekonomi.
2. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Nilai-nilai kebangsaan.
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat.

4. Meningkatnya hubungan antar lembaga yang harmonis, efektif, dan efisien, serta meningkatnya tertib administrasi Organisasi Kemasyarakatan di Kota Solok.

Untuk lebih jelasnya tentang tujuan, sasaran, indikator sasaran, target yang akan dicapai dapat dirumuskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2. Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2018

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2017
1.	Terciptanya Kehidupan yang aman ditengah masyarakat	Meningkatnya ketahanan bangsa dibidang Idiologi, politik, social, dan ekonomi	Persentase capaian tingkat keamanan di Kota Solok	85%
2.	Tertanamnya kesadaran rasa berbangsa dan bernegara	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Nilai-nilai kebangsaan	Persentase tingkat kesadaran rasa berbangsa dan bernegara	80%
3	Meningkatnya persentase Pemilih yang menggunakan hak pilihnya	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada pemilu legislatif dan pilpres	80%
4.	Terwujudnya hubungan yang harmonis antar lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang ada di Kota Solok.	Meningkatnya hubungan antar lembaga yang harmonis, efektif, dan efisien, serta meningkatnya tertib administrasi Organisasi Kemasyarakatan di Kota Solok.	Persentase tingkat hubungan yang harmonis antar lembaga dan orkemas.	85%

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok Tahun 2017, maka disusun rencana Program Kerja yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Secara keseluruhan program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa surat menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
- Penyediaan Jasa Adm. Pendukung Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ Operasional
- Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat studio dan komunikasi

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

4. Program Peningkatan Pengembangan sistim capaian kinerja dan keuangan

- Penyusunan laporan kinerja keuangan SKPD

5. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.

- Peningkatan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Aparat Sektoral dan Tokoh Masyarakat dalam Pemeliharaan Kamtibmas
- Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
- Fasilitasi Rapat Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)

6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

- Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
- Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
- Penyiapan tenaga pelaksana upacara

7. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

- Pembinaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan

8. Program Pendidikan Kedinasan Peningkatan Koordinasi dan Pembinaan Pencegahan Bahaya Narkoba dan Miras

- Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba
- Koordinasi Pencegahan dan penyalahgunaan narkoba dan minuman keras

9. Pendidikan Politik Masyarakat

- Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- Bimbingan Teknis Tatacara Pengajuan dan Pertanggungjawaban bantuan Keuangan kepada Parpol
- Dialog Politik

BAB IV

PENUTUP

Renja SKPD yang merupakan dokumen Rencana Pembangunan dimasing-masing SKPD dan juga merupakan pemutakhiran Rencana Kerja dari Renstra masing-masing SKPD yang berjangka waktu satu tahun, memuat Kebijakan, Program, dan Kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan, yang nantinya menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA – SKPD).

Tujuan penyusunan Rencana Kerja SKPD tahun 2018 untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah pada tahun 2016, sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta pembangunan yang optimal .

Dalam melaksanakan semua kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok ini dengan sebaik-baiknya.
2. Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan RAPBD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok.

Solok, Maret 2017

**KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SOLOK**

Drs. ASRIL, MM
NIP. 19721113 199203 1 002

BAB IV

PENUTUP

Renja SKPD yang merupakan dokumen Rencana Pembangunan dimasing-masing SKPD dan juga merupakan pemutakhiran Rencana Kerja dari Renstra masing-masing SKPD yang berjangka waktu satu tahun, memuat Kebijakan, Program, dan Kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan, yang nantinya menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA – SKPD).

Tujuan penyusunan Rencana Kerja SKPD tahun 2018 untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah pada tahun 2018, sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta pembangunan yang optimal .

Dalam melaksanakan semua kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Seluruh aparaturnya Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok ini dengan sebaik-baiknya.
2. Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan RAPBD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok.

Solok, Januari 2017

**KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SOLOK**

Drs. ASRIL, MM
NIP. 19721113 199203 1 002



PEMERINTAH KOTA SOLOK

RENCANA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SOLOK TAHUN 2018

**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SOLOK
TAHUN 2017**

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menegaskan bahwa setiap SKPD diharuskan menyusun Rencana Kerja setiap tahunnya.

Rancangan Rencana Kerja-SKPD Tahun 2018 merupakan salah satu bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun berdasarkan RENSTRA-SKPD Tahun 2016-2021 dan evaluasi kegiatan SKPD tahun sebelumnya.

Sehubungan dengan hal tersebut Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Solok untuk tahun 2016 telah melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang ada, dan Alhamdulillah semua program dan kegiatan tahun 2016 telah dapat direalisasikan sesuai dengan perencanaan.

Untuk Rencana Kerja tahun 2018 ini Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik akan menyusun program dan kegiatan yang focus pada peningkatan stabilitas keamanan di Kota Solok.

Solok, Maret 2017

**KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SOLOK**

Drs. ASRIL, MM

NIP. 19721113 199203 1 002

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018**

No	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	LOKASI	Target Capaian	PAGU INDIKATIF	Sumber Dana			Sumber Usulan		
						APBD KOTA	APBD Prov	APBN	Musrenbang	Renja OPD	Lainnya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Kesbangpol										
	PLAFON 2018				2,271,677,076	2,271,677,076					
	USULAN RENJA				2,271,580,900	2,271,580,900	-	-			
	KELEBIHAN DARI PLAFON 2018				(96,176)	(96,176)					
	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				2,271,580,900	2,271,580,900					
	PROGRAM PADA SETIAP PERANGKAT DAERAH				591,870,400	591,870,400					
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		100%	416,365,900	416,365,900					
	1 Penyediaan jasa surat-menyurat.	Terlaksananya Pengadaan perangko, meterai, dan benda pos lainnya	Kota Solok	12 bulan	1,980,000	1,980,000				√	
		Tersedianya									
		- Materai 3000									
		- Materai 6000									
		- Perangko/ Jasa Pengiriman surat/barang									
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	Pembayaran :	Kota Solok	12 bulan	64,500,000	64,500,000				√	
		- Rekening Listrik									
		- Rekening telepon									
		- Rekening air									
		- Rekening internet/speedy									
	4 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pembayaran :	Kota Solok	12 bulan	10,200,000	10,200,000				√	
		- Honorarium Bendahara pengeluaran									
		- Honorarium Operator SIPKD									
	5 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pembayaran jasa Petugas kebersihan Kantor	Kota Solok	12 bulan	14,150,000	14,150,000				√	
	6 Penyediaan alat tulis kantor.	Tersedianya alat tulis kantor	Kota Solok	12 bulan	13,511,500	13,511,500				√	
	7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Tersedianya Barang cetakan	Kota Solok	12 bulan	11,745,000	11,745,000				√	
		- Penggandaan surat-surat		12 bulan							
	8 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor.	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik kantor		12 bulan	6,131,400	6,131,400				√	
	9 Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Kota Solok	12 bulan	8,293,000	8,293,000				√	

No	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	LOKASI	Target Capaian	PAGU INDIKATIF	Sumber Dana			Sumber Usulan		
						APBD KOTA	APBD Prov	APBN	Musrenbang	Renja OPD	Lainnya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	10 Penyediaan makanan dan minuman.	Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu	Kota Solok	12 bulan	10,785,000	10,785,000				√	
	11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Kota Solok	12 bulan	140,470,000	140,470,000				√	
	12 Penyediaan jasa administrasi pendukung perkantoran.	Pembayaran:	Kota Solok	12 bulan	134,600,000	134,600,000				√	
		- Honor Pegawai Kontrak									
		- Tunda 13 pegawai kontrak									
		- Uang lembur									
		- Honor Pengurus barang									
		- Honor pengelola kearsipan									
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran		100%	161,243,500	161,243,500					
	1 Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya :	Kota Solok	12 bulan	46,835,000	46,835,000					
		- Komputer		2 unit							
		- Laptop		1 unit							
		- Printer		2 unit							
		-									
	2 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya :	Kota Solok	12 bulan	21,225,500	21,225,500					
		- Papan Struktur		1 buah							
		- AC		1 unit							
		- Tedmond		1 buah							
		- Dispenser		1 buah							
		- Rak Piring Lemari Kaca		1buah							
3	Pengadaan Mobiler	Terpenuhinya Kebutuhan mebeleur kantor	Kota Solok	12 bulan	48,200,000	48,200,000					
		- Filing Kabinet		2 unit							
		- Kursi Putar		6 buah							
		- Kursi Futura		30 buah							
		- Meja 1/2 Biro		6 buah							
		- Lemari Sound system		1 buah							
	4 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional.	Terlaksananya pemeliharaan	Kota Solok	12 bulan	36,733,000	36,733,000				√	
		- Kendaraan Dinas Roda 2		5 unit							
		- Kendaraan Dinas Roda 4		1 unit							
	5 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor.	Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor	Kota Solok	12 bulan	7,750,000	7,750,000				√	
		- Service Komputer									
		- Service Laptop									
		- Service Printer									
		- Service Mesin tik									
		- Service AC									
		- Vernis meja									
	6 Pemeliharaan rutin/berkala	Tersedianya pembayaran service radio dan	Kota Solok	12 bulan	500,000	500,000				√	

No	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	LOKASI	Target Capaian	PAGU INDIKATIF	Sumber Dana			Sumber Usulan		
						APBD KOTA	APBD Prov	APBN	Musrenbang	Renja OPD	Lainnya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	alat-alat studio dan komunikasi	komunikasi									
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pelanggaran Disiplin Berpakaian		0%	13,350,000	13,350,000					
	1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.	Terlaksanya pengadaan : - Pakaian Dinas Harian - Pakaian Muslim	Kota Solok		13,350,000	13,350,000				√	
				17 stel							
				17 stel							
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketetapan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan		100%	911,000	911,000					
	1 Penyusunan Laporan kinerja Keuangan SKPD	Tersedianya : - Laporan capaian kinerja SKPD - Laporan semesteran - Laporan prognosis realisasi anggaran - Laporan akhir tahun - Laporan Kinerja (LKJ) - Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) - Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Kota Solok		911,000	911,000				√	
				12 laporan							
				1 laporan							
				1 laporan							
				1 laporan							
				1 laporan							
				1 laporan							
				1 laporan							
	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat										
5	Pemeliharaan Kantrantibmas & Pencegahan Tindak Kriminal	- Pentase penanganan kasus dan sengketa dalam masyarakat		100%	466,775,500	466,775,500					
		- Jumlah demo		3 kali							
		- Jumlah rapat HTHG Kamtibmas		10 kali							
	1 Peningkatan Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Dengan Aparat Sektoral Dalam Pemeliharaan Kamtibmas	- Rapat Koordinasi Forum Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)	Kota Solok	10 kali	381,920,500	381,920,500				√	
		- Rapat Koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)		2 kali							
	2 Peningkatan Kerjasama Tim Terpadu dalam penanga	Rapat Tim Terpadu Penanganan konflik sosial	Kota Solok	4 kali	69,855,000	69,855,000				√	
	3 Fasilitasi Rapat Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)	- Rapat Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)	Kota Solok	4 kali	15,000,000	15,000,000				√	
6	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	- Intensitas KomunikasiFKUB		4 kali	67,273,500	67,273,500					
		- Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan		2 kali							
	1 Peningkatan Toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Rapat FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama)	Kota Solok	4 kali	30,000,000	30,000,000				√	
	2 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN)	Kota Solok	2 kali, 170 org	22,923,500	22,923,500				√	
	3 Penyiapan Tenaga Pelaksana upacara	Penyiapan tenaga pelaksana upacara	Kota Solok	12 kali	14,350,000	14,350,000				√	
7	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase organisasi masyarakat yang aktif			12,121,500	12,121,500					

No	Urusan/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	LOKASI	Target Capaian	PAGU INDIKATIF	Sumber Dana			Sumber Usulan		
						APBD KOTA	APBD Prov	APBN	Musrenbang	Renja OPD	Lainnya
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 Pembinaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Sosialisasi Penataan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Kota Solok	50 orang	12,121,500	12,121,500				√	
8	Program Peningkatan Koordinasi dan Pembinaan Pencegahan Bahaya Narkoba dan Miras	- Jumlah masyarakat yang tertangkap razia		20 org	1,020,433,000	1,020,433,000					
		- Cakupan penyuluhan pencegahan peredaran/penyalahgunaan miras dan narkoba		3%							
	1 Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba bagi:	Kota Solok	3 Kali	64,634,500	64,634,500				√	
		- Pelajar		180 org							
		- Mahasiswa		150 org							
		- Masyarakat		130 org							
	2 Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran/Penggunaan Narkoba dan Peredaran/Penggunaan Narkoba dan Minuman Keras	Peringatan HANI	Kota Solok	1 kali	955,798,500	955,798,500				√	
		- Jambore BNK		1400 orang							
		- Test Urine		500 orang							
		- Razia Miras dan Narkoba		18 sekolah dan 5 PT							
		- Pemberdayaan Satgas P4GN Kelurahan		26 org							
9	Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase partisipasi politik masyarakat		-	113,107,000	113,107,000					
	1 Monitoring, evaluasi dan pelaporan	- Monitoring evaluasi dan pelaporan serta Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik	Kota Solok	10 parpol	113,107,000	113,107,000				√	
		- Tersedianya Database Parpol		1 dok							

Solok, Maret 2017
KEPALA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POL
KOTA SOLOK

Drs. ASRIL, MM
Nip. 19721113 199203 1 002

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019	
Target Capaian	DANA
13	14
	-
	2,257,841,740
	-
	2,257,841,740
	523,170,890
	458,002,490
12 bulan	2,178,000
12 bulan	70,950,000
12 bulan	11,220,000
12 bulan	15,565,000
12 bulan	14,862,650
12 bulan	12,919,500
12 bulan	
12 bulan	6,744,540
12 bulan	9,122,300

[illegible]

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019	
Target Capaian	DANA
13	14
	14,685,000
	14,685,000
17 stel	
	1,002,100
	1,002,100
2 laporan	
1 laporan	
1 laporan	
	513,453,050
	420,112,550
	76,840,500
	16,500,000
4 kali	74,000,850
2 kali	
	33,000,000
	25,215,850
12 kali	15,785,000
2 kegiatan	13,333,650

PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019	
Target Capaian	DANA
13	14
	13,333,650
	1,122,476,300
	71,097,950
	1,051,378,350
1 kali	
1400 orang	
500 orang	
18 sekolah	
72%	11,407,000
	11,407,000
1 SK	

.ITIK

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KOTA SOLOK**

Unit Kerja : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

No	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Rencana Tahun 2018									CATATAN PENTING	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019	
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Sumber Usulan				Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						APBD	APBD Prov	APBN	Musrenbang	Renja SKPD	Lainnya			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran														
1.	Penyediaan jasa surat- menyurat.	Input : Dana Output : Terlaksananya Pengadaan perangko, meterai, dan benda pos lainnya Outcome : Terkirinya surat sesuai dengan jadwal	Kota Solok	12 bulan	1,980,000	V				V		P1	12 bulan	2,178,000
				12 Bulan									12 Bulan	
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.	Input : Dana Output : Terlaksananya pembayaran telepon, air dan listrik Outcome : Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Solok	12 bulan	64.500,000	V				V		P1	12 bulan	70,950,000
				12 bulan									12 bulan	
3	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.	Input : Dana Output : Tersedianya : - Filing Kabinet - Papan Struktur - Kursi Putar - Kursi Futura - Meja 1/2 Biro - Lemari Sound system - AC - Tedmond - Dispenser - Rak Piring Lemari Kaca - Komputer - Laptop - Printer - External Disk	Kota Solok	12 bulan	116,260,500	V				V		P1		
				2 unit										
				1 buah										
				6 buah										
				30 buah										
				6 buah										
				1 unit										
				1 buah										
				1 buah										
				1buah										
				2 unit										
				1 unit										
				2 unit										
				1 buah										
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Input : Dana Output : Terlaksananya pembayaran : - Honor Bendahara - Honor Operator SIPKD Outcome : Lancarnya pengelolaan administrasi keuangan	Kota Solok	12 bulan	10,200,000	V				V		P1	12 bulan	11,220,000
				12 bulan									12 bulan	
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Input : Dana Output : Terlaksananya pembayaran jasa petugas kebersihan Outcome : Terjaganya kebersihan Kantor	Kota Solok	12 bulan	14,150,000	V				V		P1	12 bulan	15,565,000
				12 bulan									12 bulan	
5	Penyediaan alat tulis kantor.	Input : Dana Output : Tersedianya penyediaan alat tulis kantor Outcome : Lancarnya operasional kantor	Kota Solok	12 bulan	13,511,500	V				V		P1	12 bulan	14,862,650
				12 bulan									12 bulan	
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input : Dana Output : Terlaksananya pengadaan barang cetakan dan penggandaan Outcome : Lancarnya operasional kantor	Kota Solok	12 bulan	11,745,000	V				V		P1	12 bulan	12,919,500
				12 bulan									12 bulan	
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor.	Input : Dana Output : Terlaksananya pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan Outcome : Lancarnya operasional kantor	Kota Solok	12 bulan	6,131,400	V				V		P1	12 bulan	6,744,540
				12 bulan									12 bulan	
8	Penyediaan peralatan rumah tangga	Input : Dana Output : Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga tangga Outcome : Lancarnya operasional kantor	Kota Solok	12 bulan	8,293,000	V				V		P1	12 bulan	9,122,300
				12 bulan									12 bulan	
9	Penyediaan makanan dan minuman.	Input : Dana Output : Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman rapat. Outcome : Lancarnya pelaksanaan kegiatan rapat	Kota Solok	12 bulan	10,785,000	V				V		P1	12 bulan	11,863,500
				12 bulan									12 bulan	
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke	Input : Dana	Kota Solok		140,470,000	V				V		P1		154,517,000

No	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Rencana Tahun 2018								CATATAN PENTING	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Sumber Usulan			Target Capaia	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
						APBD	APBD Prov	APBN	Musrenbang	Renja SKPD				Lainnya
3.	Fasilitasi Rapat Koordinasi Pengawasan Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)	Input : Dana Output : - Terlaksananya rapat Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) Outcome : Meningkatnya keamanan dan ketertiban dalam menjalankan kehidupan beragama	Kota Solok	2 kali 85%	15,000,000	V				V		P1 4 kali 1 Kali 90%	16,500,000	
F.	Program Pengembangan Wawasan Kabangsaan													
1.	Peningkatan Toleransi dan kerukunan kehidupan beragama	Input : Dana Output : Terlaksananya koordinasi kerukunan umat beragama Outcome : Meningkatnya Pemahaman Toleransi Kehidupan antar Umat Beragama	Kota Solok	4 kali 12 bulan	30,000,000	V				V		P1 4 kali 12 bulan	33,000,000	
3.	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Input : Dana Output : Terlaksananya pendidikan pendahuluan bela negara(PPBN) Outcome : - Tersedianya kader pelaksana yang terlatih - Meningkatnya keterampilan siswa & mahasiswa dalam negara	Kota Solok	2 kali 170 orang	22,923,500	V				V		P1 2 kali 170 orang	25,215,850	
4.	Penyiapan Tenaga Pelaksana upacara	Input : Dana Output : Terlaksananya penyiapan tenaga pelaksana upacara Outcome : Terlaksananya upacara hari besar nasional	Kota Solok	12 kali 1 tahun	14,350,000	V				V		P1 12 kali 1 tahun	15,785,000	
H.	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan													
1.	Pembinaan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Input : Dana Output : Terlaksananya Sosialisasi Penataan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Outcome : Meningkatnya Pengetahuan Pembina Organisasi tentang Penataan Organisasi	Kota Solok	50 orang 90%	12,121,500	V				V		P1 50 orang 90%	13,333,650	
I	Program Pendidikan kedinasan Peningkatan Koordinasi dan Pembinaan Pencegahan Bahaya Narkoba dan Miras													
1.	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Input : Dana Output : Terlaksananya penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba bagi pelajar dan mahasiswa Outcome : Berkurangnya peredaran/penggunaan minuman keras	Kota Solok	3 Kali 85%	64,634,500	V				V		P1 3 Kali 85%	71,097,950	
2	Koordinasi Pencegahan dan Peredaran/Penggunaan Narkoba Minuman Keras	Input : Dana Output : - Terlaksananya Peringatan HANI - Terlaksananya Jambore BNK - Terlaksananya Test Urine - Terlaksananya Razia Miras dan Narkoba - Pemberdayaan Satgas P4GN Kelurahan Outcome : Menurunnya angka pengguna dan pengedar narkoba dikalangan peljar, mahasiswa dan masyarakat	Kota Solok	1 kali 1400 orang 500 orang 18 sekolah 26 orang	955,798,500 1,020,433,000	V				V		P1 1 kali 1400 orang 500 orang 18 sekolah 26 orang	1,051,378,350	
J	Pendidikan Politik Masyarakat													
1.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Input : Dana Output : -Sk Walikota tentang penetapan bantuan Partai Politik(Parpol) - Rapat Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik Outcome : - Terealisasinya bantuan keuangan Partai politik sesuai dengan ketentuan yang berlaku - Tersedianya sarana dan prasarana pendukung	Kota Solok	1 SK 10 parpol 100%	97,836,200	V				V		P1 1 SK 10 parpol 100%	107,619,820	
2	Bimbingan Teknis tata cara pengajuan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada Partai Politik	Input : Dana Output : Terlaksananya tertib administrasi pelaporan Partai Politik Outcome : Meningkatnya pengetahuan anggota Partai Politik tentang tata cara pengajuan dan pertanggung jawaban keuangan Partai Politik	Kota Solok	10 Parpol 90%	85,000,000	V				V		P1 10 parpol 90%	16,258,000	
3	Dialog Politik	Input : Dana	Kota Solok		-	V				V		P1	15,977,500	

No	URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	Rencana Tahun 2018								CATATAN PENTING	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2019		
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana			Sumber Usulan			Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
						APBD	APBD Prov	APBN	Musrenbang	Renja SKPD				Lainnya
		Output : Terlaksananya Dialog pemangku kepentingan Politik		100 Orang								100 Orang		
		Outcome : Meningkatnya kesadaran Politik Masyarakat		85%								85%		
4	Monitoring dan Penyusunan Database Parpol	Input : Dana	Kota Solok		102.737.000									
		Output : Terlaksananya penyusunan Database Parpol		1 paket										
		Outcome : Tersedianya database partai politik di Kota Solok												
	Jumlah		-		3.954.677.600								2.925.507.310	

Solok, Maret 2017
KEPALA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SOLOK

Drs. ASRIL, MM
Nip. 19721113 199203 1 002